



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Senin

Tanggal: 27 April 2020

Halaman: 2

PERLU ADA PERLINDUNGAN PELAKU UMKM

Kota Yogya Rentan Alami Dampak Terberat

YOGYA (KR) - Dibanding empat kabupaten lain di DIY, Kota Yogya berpotensi atau rentan mengalami dampak terberat akibat pandemi Covid-19. Terutama dampak dari kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal ini karena aktivitas di Kota Yogya sangat ditopang oleh pariwisata dan pendidikan.

Menurut anggota Komisi B DPRD Kota Yogya Nurcahyo Nugroho, jika sektor pariwisata dan pendidikan sudah lumpuh maka akan langsung berpengaruh pada UMKM dan pekerja informal. "Dalam sebulan ini sudah banyak UMKM yang tutup karena tidak ada wisatawan. Begitu juga warung makan yang dikelola masyarakat juga tutup karena mahasiswa mulai pulang kampung," akunya, Minggu (26/4).

Oleh karena itu jika sampai akhir tahun kondisi seperti ini terjadi, maka Kota Yogya bisa memikul beban yang paling berat di DIY. Hal ini karena bisa memunculkan kerawanan sosial seiring tipologi masyarakat perkotaan sehingga perlu diantisipasi sejak dini. Berbeda dengan masyarakat pedesaan yang masih bisa mengandalkan hasil kebun atau sawah ketika ekonomi lumpuh.

Nurcahyo mengusulkan agar pemerintah daerah memberikan perhatian khusus nasib UMKM dan para pekerja di sektor informal yang terdampak Covid-19. Meski ada rasionalisasi APBD tahap ketiga yang memangkas hampir semua kegiatan, namun keberlangsungan usaha kecil yang banyak mengandalkan kegiatan pemerintah seharusnya tetap dipertahankan.

"Saya sepakat dengan pengurangan belanja untuk fokus tangani Covid-19. Tetapi hal itu harus benar-benar selektif. Pemkot perlu mengalokasi dana kegiatan untuk menjaga kelangsungan hidup usaha bahkan mereka dilibatkan dalam berbagai program penanganan Covid-19," urainya.

Dirinya mencontohkan, semangnat dalam Gandeng Gendong harus dimunculkan dalam kondisi saat ini. Seperti untuk pengadaan masker atau APD yang dilakukan Pemkot, hendaknya bisa menggandeng pelaku UMKM di Kota Yogya. Begitu juga untuk pengadaan bantuan sembako bisa melibatkan pelaku di pasar tradisional yang merupakan warga Kota Yogya. Dengan model pemberdayaan lokal, maka daftar pelaku usaha yang gulung tikar di Kota Yogya bisa dikurangi.

Sementara saat ini sudah terkumpul dana sekitar Rp 167 miliar untuk menanganai Covid-19 di Kota Yogya. Selain itu sejak 21 April 2020 lalu terbit Edaran Walikota Yogya Nomor 910/2542/SE/2020. Dalam edaran itu semua sisa belanja di seluruh OPD, harus ditiadakan hingga 30 Juni guna fokus tangani Covid-19. Kegiatan yang masih digulirkan hanya bersifat wajib seperti bayar tagihan listrik dan air, bensin kendaraan operasional, gaji pegawai non ASN, jaminan kesehatan dan lainnya.

(Dhi)-f

Ig. Trihastono, S.Sos, MM

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005